

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Definisi Kesejahteraan Sosial

Konsep kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang dilakukan dengan cara yang terorganisir dan sistematis sehingga dalam pelaksanaannya ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat membantu seseorang, kelompok, maupun masyarakat agar mendapatkan kesejahteraan sosial dalam kehidupannya. Dalam konsep kesejahteraan sosial ini berarti di mana kondisi individu merasa puas karena terpenuhi segala kebutuhan dalam kehidupannya mulai dengan individu tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu seseorang perlu memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya agar mendapatkan kesejahteraan sosial. Sejalan dengan hal ini menurut Friedlander yang dikutip dalam buku Fahrudin yang berjudul “Pengantar Kesejahteraan Sosial” menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah:

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health, and personal and social relationships that permit them to develop their full capabilities and to promote their well-being in harmony with the needs of their families and the community (Fahrudin, 2014)

Definisi di atas diartikan bahwa kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan

kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuahn keluarga dan masyarakatnya.

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisir dari pelayanan dan institusi yang dirancang untuk membantu baik itu pada individu, kelompok, maupun masyarakat guna mencapai taraf hidup yang lebih baik, serta dapat mengembangkan kemampuan mereka sebaik mungkin, dan guna mengembalikan keberfungsian sosialnya kembali agar dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam buku Fahrudin menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan membantu penyesuaian timbal balik antara individu-individu dengan lingkungan sosial mereka (Fahrudin, 2014). Oleh karena itu ada tindakan yang dilakukan untuk membantu melihat penyesuaian timbal balik yang dilakukan antara individu dengan lingkungan sosial mereka.

Kesejahteraan sosial juga dapat dikatakan sebagai suatu kondisi untuk memenuhi kebutuhan seseorang sehingga dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Definisi kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi seseorang

dapat memenuhi segala kebutuhan dasar yang dimiliki contohnya seperti dalam hal material, spiritual, dan sosial agar warga negara dapat hidup layak secara baik dan juga mampu mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan dapat mengembalikan keberfungsian sosial.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi seseorang yang dapat memenuhi segala kebutuhan dalam hidupnya, serta dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensinya, dan dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik sehingga dapat mengembalikan keberfungsian sosial serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Menurut Fahrudin kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2014)

Selain itu, Schneiderman (1972) dikutip buku Fahrudin mengemukakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem, dan perubahan sistem.

1. **Pemeliharaan Sistem**

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termasuk hal-hal yang bertalian dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup orang seorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, peranan pria

dan wanita; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan lain-lain.

2. Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi; mengintensifkan fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, (re) sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku misalnya kelompok remaja dan kelompok lain dalam masyarakat.

3. Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat (Effendi, 1982; Zastrow, 1982). Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil; dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia dan adil pula (Fahrudin, 2014)

Definisi mengenai tujuan-tujuan kesejahteraan sosial di atas menurut Fahrudin menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki tujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, untuk mencapai penyesuaian diri yang baik dengan lingkungannya. Selain itu ditambahkan tujuan menurut Schneiderman, tujuan kesejahteraan sosial ini berkaitan dengan adanya pemeliharaan sistem yang dilakukan, melakukan pengawasan sistem secara efektif dalam membantu memecahkan masalah, dan melakukan perubahan sistem ke arah perkembangan yang lebih baik untuk kedepannya.

2.1.3 Fungsi-fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi yang mampu mendorong

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial tersebut antara lain:

- a. Fungsi Pencegahan (*preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
- b. Fungsi penyembuhan (*curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
- c. Fungsi Pengembangan (*development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- d. Fungsi Penunjang (*supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial. Fungsi kesejahteraan sosial ini dapat di terapkan dalam praktik pekerja sosial profesional dan dalam pemecahan masalah yang terjadi (Fahrudin, 2014)

Definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial memiliki empat fungsi yang di mana fungsi-fungsi tersebut berkaitan dengan fungsi pencegahan untuk memperkuat individu, kelompok, maupun masyarakat dari masalah-masalah sosial. Kemudian fungsi penyembuhan untuk menghilangkan kondisi yang tidak menyenangkan menjadi lebih baik dari sebelumnya, lalu fungsi pengembangan dalam hal ini melakukan pengembangan agar dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, serta fungsi penunjang di mana mencakup kegiatan untuk membantu mencapai sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan yang lain.

2.1.4 Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial atau *social welfare services* pada umumnya hanya disebut sebagai pelayanan sosial atau *social services*. Usaha kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang penting dalam mencapai tujuan tersebut. Cassidy dikutip Fahrudin yang mengatakan bahwa:

Usaha kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan, rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan (Fahrudin, 2014)

Selain itu dalam UU No.6 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 disebutkan juga mengenai usaha kesejahteraan sosial bahwa Usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang diitujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Namun dalam UU No.11 Tahun 2009 dinyatakan juga mengenai usaha kesejahteraan sosial merupakan:

Usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Pengertian di atas mengenai usaha kesejahteraan sosial, pekerjaan sosial memegang peranan sentral yaitu sebagai "*metha-institution*". Hal ini berarti bahwa dalam usaha kesejahteraan sosial, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, maka profesi pekerjaan sosial merupakan profesi utama di dalamnya.

2.2 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah suatu pekerjaan professional yang saling terikat dengan kesejahteraan sosial dan sama-sama bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian seseorang, serta untuk mencapai tujuan agar dapat kembali melaksanakan tugas dan perannya sesuai yang diharapkan. Menurut studi

kurikulum yang disponsori oleh *the Council on Social Work Education* dinyatakan bahwa:

“Social work seeks to enhance the social functioning of individuals, singly and in groups, by activities focused upon their social relationships which constitute the interaction between man and his environment. These activities can be grouped into three functions: restoration of impaired capacity, provision of individual and social resources, and prevention of social dysfunction” (Fahrudin, 2014)

Definisi di atas diartikan yaitu Pekerjaan sosial berusaha untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, secara sendiri-sendiri atau dalam kelompok, dengan kegiatan-kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial mereka yang merupakan interaksi antara orang dan lingkungannya. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga fungsi: pemulihan kemampuan yang terganggu, penyediaan sumber-sumber individu dan sosial, dan pencegahan disfungsi sosial.

Definisi di atas juga mengartikan bahwa pekerjaan sosial merupakan suatu kegiatan yang diartikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik itu untuk individu, kelompok, maupun Masyarakat sehingga kegiatan yang dipusatkan pada hubungan-hubungan sosial antara orang dengan lingkungan agar mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga dapat memulihkan dan memecahkan permasalahan sosial yang terjadi. Siporin (1975) dikutip Fahrudin mendefinisikan pekerjaan sosial yaitu:

Social work is defined as a social institutional method of helping people to prevent and resolve their social problems and to restore and enhance their social functioning (Fahrudin, 2014)

Definisi di atas menyatakan pekerjaan sosial didefinisikan sebagai metode kelembagaan sosial untuk membantu orang untuk mencegah dan memecahkan masalah-masalah sosial mereka. Selain itu pekerjaan sosial adalah suatu metode

kelembagaan sosial yang membantu seseorang, kelompok, maupun masyarakat untuk mencegah dan memecahkan permasalahan-permasalahan sosial agar dapat menemukan solusi yang tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pekerjaan sosial juga merupakan suatu profesi pelayanan manusia untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya.

Definisi pekerjaan sosial internasional yang baru diterima oleh *The International Federation of Social Workers* (IFSW) dan yang dibenarkan oleh NASW mengenai pengertian pekerjaan sosial adalah suatu profesi yang meningkatkan suatu perubahan, pengertiannya adalah sebagai berikut:

The social work profession promotes social change, problem-solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work (Fahrudin, 2014)

Definisi di atas diartikan bahwa pekerjaan sosial meningkatkan perubahan sosial, pemecahan masalah dalam hubungan-hubungan manusia serta pemberdayaan dan pembebasan orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan menggunakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik-titik tempat orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial.

Selain itu pekerjaan sosial merupakan kegiatan untuk meningkatkan perubahan sosial, dan membantu untuk pemecahan sosial yang terjadi dan nantinya akan dilihat strategi dan juga cara yang tepat dalam pemecahan masalah sosial yang terjadi. Tentunya dalam melakukan suatu pekerjaan sosial perlu menggunakan

teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial dan melakukan intervensi sesuai dengan kebutuhan dalam permasalahan yang terjadi.

2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan hal dalam melakukan dan meningkatkan keberfungsian sosial seseorang. Pekerjaan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang agar dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya. Tujuan pekerjaan sosial menurut NASW dikutip Fahrudin (2014) adalah:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber, pelayanan-pelayanan, dan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber dan pelayanan-pelayanan
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial (Fahrudin, 2014)

Selain keempat tujuan itu, Zastrow (2008) dikutip Fahrudin juga menambahkan empat tujuan lagi yang dikemukakan oleh CSWE mengenai tujuan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam (Fahrudin, 2014)

Definisi di atas menyatakan mengenai tujuan pekerjaan sosial yaitu ada beberapa hal dan bidang yang ditujukan untuk membantu seseorang, kelompok, maupun masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi agar

kedepannya dapat di cari intervensi yang tepat untuk permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam hal ini intervensi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.

2.2.3 Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dilakukan untuk membantu baik itu individu, kelompok, maupun masyarakat itu dan sudah berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga keterampilan yang relevan, sehingga ilmu pengetahuan yang didapatkan dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemecahan permasalahan sosial yang terjadi. Menurut Iskandar fungsi-fungsi dasar pekerjaan sosial di dalam sistem kesejahteraan sosial sebagai berikut:

- a. Mengembangkan, memelihara dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial, sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di dalam fungsi ini dilakukan melalui upaya pelayanan sosial, perencanaan kesejahteraan sosial, perbaikan dan pemeliharaan penghasilan, administrasi kesejahteraan sosial dan aksi sosial.
- b. Menjamin standar subsistensi kesehatan dan kesejahteraan yang memadai bagi warga. Tugas-tugas dalam menjamin standar Kesehatan dan kesejahteraan agar memadai bagi warga, yang mencakup sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan sumber-sumber manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar individu maupun kelompok,
 - b. Mendistribusikan dan pemeratakan alokasi sumber-sumber ekonomi maupun sosial,
 - c. Mencegah timbulnya kesengsaraan dan mengatasi kemelaratan individu,
 - d. Melindungi individu maupun keluarga dari bahaya-bahaya kehidupan dan membantu mereka yang mengalami bencana, kecacatan, ketidakmampuan fisik maupun mental dan sebagainya (Iskandar, 2013)

Definisi di atas mengatakan bahwa pekerjaan sosial memiliki fungsi untuk memenuhi segala kebutuhan dalam hal pemecahan masalah yang terjadi sehingga dapat diberikan intervensi yang tepat dalam pemecahan suatu masalah. Pekerjaan sosial juga memiliki fungsi bahwa seseorang atau Masyarakat dalam menghadapi

suatu permasalahan sosial ini dapat mengembangkan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sehingga menunjang untuk intervensi yang akan dilakukan.

2.2.4 Peran-peran Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu pekerjaan sosial di mana pekerjaan professional yang memberikan bantuan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial dengan cara memberikan intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah tersebut. Pekerjaan sosial dalam melakukan intervensi juga dapat disertai dengan peran-peran pekerja sosial dalam membantu mengatasi permasalahan sosialnya. Peranan pekerjaan sosial menurut Sukoco mengatakan bahwa:

- a. Sebagai pemercepat perubahan (*enabler*)
Sebagai enabler, seorang pekerja sosial membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dalam mengakses sistem sumber yang ada, mengidentifikasi masalah dan mengembangkan kapasitasnya agar dapat mengatasi masalah untuk pemenuhan kebutuhannya.
- b. Peran sebagai perantara (*broker*)
Peran sebagai perantara yaitu dengan menghubungkan individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat dengan lembaga pemberi pelayanan masyarakat dalam hal ini: Dinas Sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah, agar dapat memberikan pelayanan kepada individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat.
- c. Pendidik (*educator*)
Dalam menjalankan peran sebagai pendidik, *community worker* diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan benar serta mudah diterima oleh individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat yang menjadi sasaran perubahan.
- d. Tenaga ahli (*expert*)
Dalam kaitannya sebagai tenaga ahli, pekerja sosial dapat memberikan masukan, saran, dan dukungan informasi dalam berbagai area (individu-individu, kelompok-kelompok, dan masyarakat).
- e. Perencana sosial (*social planner*)
Seorang perencana sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang dihadapi individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional dalam

mengakses sistem sumber yang ada untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu dan keluarga, kelompok, dan masyarakat.

f. Fasilitator

Pekerja sosial sebagai fasilitator, dalam peran ini berkaitan dengan menstimulasi atau mendukung pengembangan masyarakat. Peran ini dilakukan untuk mempermudah proses perubahan-perubahan individu, kelompok-kelompok dan masyarakat, menjadi katalis untuk bertindak dan menolong sepanjang proses pengembangan dengan menyediakan waktu, pemikiran dan sarana-sarana yang dibutuhkan dalam proses tersebut (Sukoco, 1995)

2.2.5 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam melakukan prakteknya selain berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga bidang-bidang ilmu lain yang berkaitan dengan pekerjaan sosial, perlu adanya peran-peran pekerja sosial yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan fokusnya baik itu pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Selain peran ada juga metode pekerjaan sosial yang bertumpu dan focus pada suatu bidang pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Menurut Adi metode yang digunakan pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

a. *Social Casework* (terapi individu dan keluarga)

Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan yang mempunyai masalah. Menurut Skidmore, Thackeray dan Farley dalam menggambarkan proses casework menjadi empat tahapan, adalah sebagai berikut:

1. Tahap penelitian, pada tahap ini klien mulai menjalani relasi dengan *caseworker*. Pada tahap ini selain mengumpulkan dan memilah data klien yang dapat dijadikan pegangan dalam proses pertolongan.
2. Tahap pengkajian, dari pengkajian yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan berbagai macam bentuk terapi.
3. Tahap intervensi, dalam tahapan ini sebenarnya sudah diawali dengan pertemuan awal dengan klien. Hal ini karena proses penelitian sudah

dapat dikatakan sebagai treatment ketika proses ini sudah membantu klien untuk dapat mengklarifikasi permasalahannya dan berusaha melakukan perubahan kondisi kehidupan.

4. Tahap terminasi, fase ini merupakan tahapan di mana relasi antara *caseworker* dan klien akan dihentikan (Adi, 2005)

Definisi di atas menyatakan bahwa pekerjaan sosial memiliki metode yang dapat digunakan yaitu metode casework, dalam hal ini seorang pekerja sosial fokus untuk membantu individu dan keluarga yang sedang menghadapi permasalahan sosial sehingga metode ini mengharuskan pekerja sosial dapat memahami peran-peran pekerja sosial.

b. *Social Group Work* (Bimbingan Sosial Kelompok)

Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode groupwork. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok. Menurut Skidmore, Tharckeray dan Farley dalam Adi menyatakan groupwork sebagai:

A method of working with people in groups (two or more people) for the enhancement of social functioning and for the achievement of socially desirable goals. Group work is based on the knowledge of people's needs for each other and their interdependence. Groupwork is a methode of reducing and for accomplishing socially desirable purposes (Adi, 2005)

Definisi di atas menyatakan bahwa pekerjaan sosial memiliki metode group work yang di mana pada metode ini seorang pekerja sosial memiliki fokus untuk membantu suatu kelompok yang sedang mengalami permasalahan sosial sehingga perlu adanya metode dan peran yang sesuai untuk mengatasi permasalahan sosial yang sedang dihadapi.

c. Metode Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat

Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya merubah masyarakat di tingkatan yang lebih luas. Menurut Brokensha dan Hodge dalam Adi mendefinisikan pengembangan masyarakat sebagai:

A movement designed to promote better living for the whole community with active participation, and, if possible, on the initiative of the community. It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local government bodies (Adi, 2005)

Definisi di atas mengartikan bahwa masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan harus berhubungan juga dengan lembaga atau tempat yang terkait. Pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk pemerintahan lokal terdekat.

2.2.6 Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam melaksanakan prakteknya perlu dilakukan dengan berbagai tahapan seperti metode dan juga peran-peran pekerja sosial yang sesuai dengan fokusnya baik itu pada individu, kelompok, maupun masyarakat. Oleh karena itu dalam hal ini seorang pekerjaan sosial perlu memiliki nilai dan etikanya dalam menjalankan tugasnya yang akan membantu memecahkan permasalahan sosial. Dalam kaitan dengan nilai dan prinsip-prinsip dasar ini, Zastrow (2010) dalam Adi melihat ada tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dan

diekspansi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut adalah:

1. Pengetahuan (*knowledge*)
Menurut pendapat Kahn (1969) pengetahuan adalah pemahaman teoretis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan (*science*); belajar; dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktik serta pengembangan keterampilan. Sedangkan Pincus dan Minahan dalam Zastrow (2010) melihat pengetahuan sebagai pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses observasi secara ilmiah, sehingga hasilnya telah diverifikasi terlebih dahulu, serta dapat diverifikasi oleh mereka yang ingin menguji keabsahan dari hasil observasi tersebut.
2. Keterampilan (*Skill*)
Keterampilan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan (*helping profession*), serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Secara definitif, keterampilan didefinisikan sebagai kemampuan, keahlian ataupun kemahiran yang diperoleh dari praktik dan pengetahuan. Di sini, keterampilan tidak muncul sekadar dari suatu proses uji-coba belaka, tetapi keterampilan muncul karena adanya keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari oleh seorang agen perubahan.
3. Nilai (Value)
Pincus dan Minahan (1973) menyatakan nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia (*Values are beliefs, preferences, or assumptions about what is desirable or good for humans*). Nilai yang dianut oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Pincus dan Minahan dalam Zastrow (2010) melihat nilai bukan sebagai sesuatu yang kita lihat dari dunia kita berdasarkan apa yang kita ketahui, akan tetapi nilai lebih terkait dengan apa yang seharusnya terjadi (Adi, 2015)

Dari nilai-nilai di atas perlu adanya prinsip yang dipegang teguh oleh seorang pekerja sosial. Prinsip-prinsip dalam pekerjaan sosial ini bersangkutan dengan etika yang dimiliki dan dijalankan pekerja sosial dalam memberikan pertolongan kepada klien. Di bawah ini akan diuraikan prinsip-prinsip dasar berdasarkan urutan yang dibuat Henry Maas (1977) dalam Isbandi, yaitu:

1. Penerimaan (*acceptance*)
Prinsip ini secara mendasar melihat bahwa praktisi harus berusaha menerima klien (*client*) mereka apa adanya, tanpa menghakimi klien tersebut. Kemampuan praktisi untuk menerima klien (pihak yang

membutuhkan bantuan) -nya dengan sewajarnya akan dapat banyak membantu perkembangan relasi antar mereka.

2. Komunikasi (*communication*)
Prinsip komunikasi ini berkaitan erat dengan kemampuan praktisi untuk menangkap informasi ataupun pesan yang dikemukakan oleh klien. Pesan yang disampaikan klien dapat berbentuk pesan verbal, yang diungkapkan klien melalui ucapannya. Atau pesan tersebut dapat pula berbentuk pesan non-verbal, misalnya dari cara duduk klien, cara klien menggerakkan tangan, cara meletakkan tangan, dan sebagainya.
3. Individualisasi (*individualisation*)
Prinsip individualisasi, pada intinya menganggap setiap individu berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga seorang praktisi haruslah berusaha memahami keunikan dari setiap klien. Karena itu, dalam proses pemberian bantuan harus berusaha mengembangkan intervensi yang sesuai dengan kondisi kliennya agar mendapatkan hasil yang optimal. Dengan adanya prinsip individualisasi ini maka praktisi diharapkan tidak menyamaratakan klien.
4. Partisipasi (*participation*)
Pada prinsip ini, praktisi didorong untuk menjalankan peran sebagai fasilitator. Dari peran ini, praktisi diharapkan akan mengajak kliennya untuk berpartisipasi aktif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Karena tanpa partisipasi aktif dari klien, maka tujuan dari terapi tersebut sulit untuk tercapai.
5. Kerahasiaan (*confidentiality*)
Dalam prinsip ini, praktisi harus menjaga kerahasiaan dari kasus yang sedang ditanganinya. Sehingga kasus itu tidak dibicarakan dengan sembarang orang yang tidak terkait dengan penanganan kasus tersebut. Praktisi baru dapat membicarakan kasus tersebut ketika kasus tersebut sedang dibahas dalam suatu tim kerja.
6. Kesadaran Diri Petugas (*worker self-awareness*)
Prinsip kesadaran diri (*self awareness*) ini menuntut praktisi untuk bersikap profesional dalam menjalin relasi dengan kliennya. Dalam arti bahwa praktisi harus mampu mengendalikan dirinya sehingga tidak terhanyut oleh perasaan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh kliennya. Praktisi di sini haruslah tetap rasional, tetapi mampu untuk menyelami perasaan kliennya secara objektif (Adi, 2015)

2.3 Tinjauan Tentang Kemiskinan

2.3.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang marak terjadi dikarenakan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan tersebut.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang sampai saat ini belum ditemukan

solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Secara harfiah pengertian kemiskinan menurut Poewadarminta (1976) dikutip Rustanto yaitu:

Kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya “tidak berharta-benda”. Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain (Rustanto, 2015)

Kemiskinan memang salah satu permasalahan sosial yang masih belum teratasi hingga kini. Banyak yang beranggapan mengenai pengertian kemiskinan yang mencakup berbeda-beda dalam klasifikasinya. Ada juga pendapat lain mengenai pengertian kemiskinan menurut kuncoro (1997) dikutip Rustanto yaitu:

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Adapun Kartasmita (1997) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam Pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan (Rustanto, 2015)

Selain itu ada juga pendapat lain mengenai pengertian kemiskinan yaitu menurut Narayan (2007) dikutip Rustanto yang mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut:

Poor here means lacking most or all of these assets and capabilities, material, assets, bodily health, bodily integrity, emotional integrity, respect, and dignity, social belonging, cultural identity, imagination, information, and education, organizational capacity, political representation and accountability (Rustanto, 2015)

Definisi di atas diartikan yaitu miskin di sini dimaknai dengan ketiadaan asset/kekayaan dan kemampuan, kekayaan harta, kesehatan, integritas, emosi, penghormatan, rasa memiliki sosial, identitas budaya, imajinasi, informasi, dan Pendidikan, kemampuan berorganisasi dalam ranah politik dan akuntabilitas).

Selain itu definisi di atas membahas mengenai kemiskinan yang berdasarkan ketidakmampuan uang atau kekayaan yang dimiliki dan dapat dikonotasikan bahwa suatu kemiskinan itu sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, kelompok, maupun keluarga yang mengakibatkan permasalahan sosial. Kurangnya pendapatan mengakibatkan kebutuhan pokok yang berkecukupan. Adapun kemiskinan yang mengenai masalah dalam Pembangunan yang biasanya ditandai dengan angka pengangguran dan keterbelakangan semakin meningkat menjadi ketimpangan.

Berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Contohnya seperti pendidikan yang rendah, sehingga banyak yang menganggur dan tidak bekerja serta banyak warga yang belum mampu mengakses program maupun pelayanan pemerintah sehingga sulit memenuhi kebutuhannya (Rustanto, 2015)

2.3.2 Ciri-Ciri Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan kondisi yang sulit dan kebutuhan yang tidak tercapai. Kemiskinan yang terjadi dikarenakan berbagai faktor sehingga hal tersebut akan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya cara atau strategi yang baik untuk mengentaskan kemiskinan tersebut agar memiliki kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya.

Soeharto (2009) dikutip Rustanto mengatakan kemiskinan memiliki ciri dimensi ekonomi yang bermakna tidak mempunyai harta, tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik dan dimensi sosial yang bermakna akses di ruang public dengan rendahnya pendidikan dan keterampilan yang berguna untuk kehidupannya sehingga terdapat ciri kemiskinan terutama pada keluarga fakir miskin, yaitu:

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental
- c. Tidak mampu berfungsi social
- d. Rendahnya sumber daya manusia
- e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
- g. Ketiadaan akses terhadap terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan, dll)
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat (Rustanto, 2015)

Definisi di atas menyatakan bahwa kemiskinan ini memiliki beberapa aspek yang dapat mempengaruhi seseorang atau masyarakat dapat mengalami kemiskinan dalam kehidupannya. Kemiskinan memiliki ciri-ciri yang mendorong seseorang untuk mengalami kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi seperti sumber daya manusia yang kurang, tidak adanya akses dalam suatu bidang, dll. Hal ini berdampak pada ketidakberfungsian sosial dan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan akan berdampak pada bidang yang lainnya.

2.3.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi suatu keadaan tersebut tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik pada sandang, pangan, papan, yang seharusnya hal ini diperlukan seseorang dalam melaksanakan peran dan tugasnya di lingkungan sehingga dia akan mencapai tujuan yang

diharapkan. Kemiskinan memiliki berbagai macam faktor yang dapat di lihat dan di kaji lebih dalam untuk kedepannya menemukan solusi yang tepat. Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (awal mula kemiskinan) dan diantaranya yaitu:

1. **Kemiskinan Natural**
Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin, kelompok Masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya Pembangunan atau kalaupun mereka ikut serta dalam Pembangunan mereka hanya dapat imbalan pendapatan yang rendah.
2. **Kemiskinan Kultural**
Kemiskinan kultural adalah mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok Masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan mengubah tingkat kehidupannya.
3. **Kemiskinan Struktural**
Kemiskinan structural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia, seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi asset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok Masyarakat tertentu (Rustanto, 2015)

2.3.4 Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang terjadi dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang ataupun Masyarakat. Dalam hal ini kemiskinan juga memiliki dimensi sehingga dapat melihat kemiskinan ini dikategorikan pada dimensi yang mana agar lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, Cox (2004) dikutip Suharto membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi;

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan yang kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin

terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi

2. Kemiskinan yang berkaitan dengan Pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya Pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses Pembangunan, kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan dan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh Perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal kemiskinan, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk (Suharto, 2014)

2.3.5 Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial (*social protection*). Perlindungan sosial adalah skema yang dirancang secara terencana oleh pemerintah maupun Masyarakat untuk melindungi anggotanya dari berbagai resiko dalam kehidupannya.

Suharto (2009) menyatakan perlindungan sosial terdiri lima komponen utama, komponen tersebut diimplementasikan secara tepat dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial dalam arti luas, maka skema perlindungan sosial dapat berkontribusi signifikan mengurangi tingkat kemiskinan. Penjelasan komponen tersebut adalah:

1. Bantuan Sosial
Skema jaminan sosial (*social security*) yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan berdasarkan “test kemiskinan” tanpa memperhatikan kontribusi sebelumnya (*poor contribution*).
2. Asuransi Sosial
Skema jaminan sosial yang hanya diberikan kepada para peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni berdasarkan premi atau tabungan yang dibayarkannya. Sistem asuransi kesehatan dan pensiun adalah dua bentuk asuransi sosial yang banyak diterapkan di banyak negara.

3. Kebijakan-kebijakan pasar kerja (*labour market policies*)
Pekerjaan adalah bentuk perlindungan sosial yang berkelanjutan. Kebijakan pasar kerja merupakan kebijakan publik untuk meregulasi dunia kerja yang dapat menstabilkan hukum penawaran dan permintaan kerja, serta melindungi tenaga kerja dari risiko-risiko di tempat kerja.
4. Mekanisme dan jarring pengaman sosial berbasis masyarakat
Di pedesaan dan perkotaan terdapat kelompok arisan, raksa desa, *beasperelek*, siskamling, kelompok pengajian, kelompok dana kematian yang secara swadaya, partisipatif, egaliter menyelenggarakan pelayanan sosial. Depsos menyebut sistem perlindungan sosial semacam ini dengan istilah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
5. Perlindungan Anak (*child protection*)
Anak cacat atau anak dengan kemampuan khusus (AKK) adalah sebuah sub kelompok atau bagian dari populasi orang dengan kebutuhan khusus (ODKK) dengan hak untuk mendapat pendidikan, kesehatan, rekreasi dan perlindungan (Suharto, 2009)

2.4 Kemiskinan dan Pekerjaan Sosial

2.4.1 Ukuran-Ukuran Kemiskinan

Saat ini kemiskinan yang terjadi dapat dilihat dari berbagai macam faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut terjadi. Selain itu ada juga beberapa ukuran-ukuran kemiskinan yang dapat di lihat sesuai dengan standar dan ketentuannya yang berbeda-beda. Ada dua kategori tingkat kemiskinan menurut Alfian, Tan, Soemardjan, 1980 dikutip Huraerah, dua kategori tersebut adalah:

1. Kemiskinan Absolut
Suatu kondisi di mana Tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relatif
Perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relative karena lebih berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial (Huraerah, 2019)

Di sisi lain, Sach mengungkapkan bahwa ada tiga kategori kemiskinan, yaitu:

- (i) *extreme poverty*, yakni rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,
- (ii) *moderate poverty*, yaitu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya,

tetapi sangat minim dan tidak selalu mampu; dan (iii) *relative poverty*, yakni rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi berada di bawah rata-rata cara orang hidup di negeri yang bersangkutan (Huraerah, 2019)

2.4.2 Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan selain memiliki ukuran-ukurannya namun ada pula dimensi yang berkaitan dengan kemiskinan. Kemiskinan memang tidak hanya bersifat pada kurangnya pendapatan ekonomi, namun masih banyak faktor lain yang terikat dengan permasalahan kemiskinan ini. Moeljarto (1994) dikutip Huraerah mengungkapkan dimensi-dimensi kemiskinan sebagai berikut:

1. Kemiskinan berdimensi ekonomi atau material
Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material, yaitu seperti pangan, sandang, dan perumahan. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari Tingkat inflasi rupiah itu sendiri.
2. Kemiskinan berdimensi sosial dan budaya
Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini, sehingga ukurannya sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup mereka.
3. Kemiskinan berdimensi *structural* atau politik
Orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakikatnya karena mengalami kemiskinan structural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik dan tidak memiliki kekuatan politik sehingga menduduki structural sosial paling bawah (Huraerah, 2019)

Definisi di atas mengenai dimensi-dimensi kemiskinan menyatakan bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia setiap harinya akan berbeda-beda. Kemiskinan yang terjadi seharusnya tidak hanya melihat kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang, namun perlu melihat juga dimensi non ekonominya agar pengentasan kemiskinan ini berusaha ditanggulangi dengan cara terbaik.

2.4.3 Kemiskinan dalam perspektif Pekerjaan Sosial

Permasalahan sosial yang terjadi salah satu kemiskinan ini menimbulkan banyak masalah-masalah lain dan berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Masalah sosial kemiskinan ini juga dapat di lihat dari berbagai macam perspektif ilmu salah satunya yaitu pada perspektif profesi pekerjaan sosial, yang di mana salah satunya membahas dan membantu memberikan pertolongan pada seseorang atau masyarakat yang kurang mampu.

Ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya itu sangat berkaitan dengan faktor produksi. Mereka pada umumnya tidak memiliki faktor produksi yang mencukupi seperti tanah, modal, atau keterampilan hidup (*life skills*). Selain mempunyai keterbatasan dalam faktor kepemilikan tersebut, orang miskin juga lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas akses ekonominya, sehingga semakin tertinggal jauh dari kelompok masyarakat lain yang mempunyai potensi tinggi (Huraerah, 2019)

Pekerjaan sosial dengan salah satu metodenya, yaitu *community development/community organization*, dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi upaya penanggulangan kemiskinan. *Community development* adalah metode yang dapat dilakukan untuk membangun Masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat sendiri. Terdapat strategi-strategi yang digunakan dalam metode *community development*, sebagai upaya peningkatan dan pengembangan kapasitas masyarakat miskin yang diungkapkan Huraerah sebagai berikut:

1. **Strategi Pemecahan Masalah**
Dimaksudkan untuk mengajak warga Masyarakat miskin melihat dan menyadari permasalahan yang dihadapi, kemudian mendiskusikan bersama bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Teknik *motivating* dan *supporting* dapat digunakan untuk membangkitkan kepercayaan diri (*self-reliance*) mereka, sebagai unsur penting yang harus dikembangkan dalam meminimalisir dampak negatif budaya kemiskinan tadi.
2. **Konfrontasi**
Strategi mengkonfrontasi masyarakat miskin dengan permasalahan yang dihadapi. Strategi ini dimaksudkan untuk dapat menimbulkan kesadaran serta menggalang kesatuan dan kekuatan mereka untuk bertindak dalam menangani masalah tersebut.
3. **Membangun kelembagaan baru**
Membangun lembaga-lembaga dalam masyarakat dengan menggunakan sumber daya masyarakat setempat, di mana masyarakat miskin diintegrasikan ke dalam lembaga tersebut.
4. **Pengembangan dan peningkatan keterampilan hidup (*life skills*)**
Dalam hal ini mengajarkan cara-cara atau alat-alat dalam perubahan yang sudah direncanakan.
5. **Terapi pendidikan**
Strategi untuk mengikutsertakan Masyarakat miskin dalam suatu program penanggulangan kemiskinan, yang biasanya dalam bentuk latihan-latihan, saling bekerja sama secara demokratis, dan belajar untuk menilai dan menghargai Kerjasama tersebut (Huraerah, 2019)

2.4.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Masalah sosial kemiskinan masih marak terjadi di kehidupan saat ini, jika terus dibiarkan maka masalah sosial kemiskinan ini akan berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya dan nantinya akan sulit untuk mengatasinya. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang baik dalam mengentaskan permasalahan sosial kemiskinan ini agar seseorang atau masyarakat dapat mengembalikan keberfungsian sosialnya, sehingga dapat menjalankan aktivitas dengan baik dan benar. Seperti yang diungkapkan Huraerah (2019) yang mengatakan strategi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain kebutuhan

pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan non ekonomik.

2. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, maka strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*) serta informasi pasar.
3. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi bahkan pada proses pengambilan keputusan.
4. Strategi pemberdayaan. Kelompok *agrarian populism* yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan bahwa masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya (Huraerah, 2019)

Definisi di atas mengenai strategi penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan tidak hanya melihat aspek ekonominya saja melainkan melihat dimensi lain faktor apa yang dapat digali untuk meminimalisir kemiskinan yang terjadi. Selain itu masyarakat perlu memanfaatkan sumber daya alam, ataupun manusia yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik pula antara masyarakat itu sendiri dalam proses perencanaan, pengawasan, ataupun pelaksanaan dan disesuaikan dengan kemampuan masyarakatnya. Dan terakhir perlu adanya suatu kelompok yang memang konsentrasi di bidang kemiskinan agar saling bekerjasama untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini.

2.5 Tinjauan tentang Pelayanan Sosial Rutilahu

2.5.1 Pelayanan Bantuan Sosial Rutilahu

Salah satu program bantuan sosial yang dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan adanya program rutilahu bagi rumah tangga miskin yang memerlukan bantuan untuk rehabilitasi rumah yang tidak layak huni. Program bantuan sosial ini

merupakan salah satu pelayanan sosial dalam bidang kesejahteraan sosial, yang di mana salah satu permasalahan sosial yang harus di atasi yaitu rumah tidak layak huni. Oleh karena itu DTKS merupakan bagian yang penting dalam penyaluran suatu bantuan sosial yang dalam hal ini merupakan bantuan sosial program rutilahu bagi rumah tangga miskin.

Pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial meliputi usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian atau penjaminan kualitas, sampai penetapan dan penggunaan. Setiap penerima bantuan RS-RTLH harus terdaftar dalam DTKS yang sudah terverifikasi dan tervalidasi kelengkapan administrasi dan pengecekan dilapangan guna memastikan penerima benar-benar layak untuk dibantu, sehingga bantuan RS-RTLH berupa rumah layak huni menjadi tepat sasaran (Manoppo & Laoh, 2022)

2.6 Tinjauan tentang Bantuan Sosial

2.6.1 Pengertian Bantuan Sosial

Permasalahan sosial kemiskinan ini harus segera diatasi dengan strategi yang tepat dan baik dengan memanfaatkan berbagai macam faktor yang meningkatkan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dapat mengembalikan keberfungsian sosial untuk melaksanakan tugas dan perannya di lingkungan secara baik.

Masalah sosial kemiskinan ini berkaitan dengan adanya peran dari pemerintah untuk dapat memiliki strategi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk membantu seseorang atau masyarakat yang kurang mampu yaitu dengan memberikan bantuan sosial

kepada masyarakat yang membutuhkan untuk segera diberikan bantuan yang layak. Sesuai dengan pengertian bantuan sosial menurut Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 dalam Rahayu yaitu:

Bantuan sosial (Bansos) adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, sifatnya tidak terus menerus dan selektif (Rahayu, 2012)

Definisi di atas mengartikan bahwasannya bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang berikan kepada masyarakat dan bertujuan untuk melindungi kesejahteraan sosial dengan menghindari resiko sosial yang akan berdampak buruk pada masyarakat itu sendiri. Bantuan sosial dalam pemberiannya dapat diberikan secara langsung atau dengan cara memberikan kepada lembaga yang berkaitan, yang tetap mempunyai tujuan yang sama untuk membantu Masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Pada dasarnya bantuan sosial merupakan salah satu program pemerintah yang harus dilakukan dengan melihat dan meninjau langsung karena pemberian yang dilakukan harus selektif. Berbeda pada pengertian bantuan sosial menurut Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1 yang menyatakan bahwa:

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Definisi di atas menyatakan bahwa bantuan sosial merupakan pemberian bantuan baik itu berupa uang/barang dari pemerintah daerah yang diberikan kepada

yang membutuhkan bantuan seperti individu, keluarga, maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara baik. Pemberian bantuan tersebut dilakukan secara terus menerus agar nantinya dapat terlindungi dari resiko sosial.

2.6.2 Jenis-jenis Bantuan Sosial

Berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 Pasal 30, terdapat jenis-jenis bansos antara lain:

1. Bansos dalam bentuk uang, termasuk belanja yang tidak langsung dalam APBD. Jenis, objek dan perincian secara detail dari belanja bansos terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Bansos berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD, yang diformulasikan dalam kegiatan dan program yang diuraikan ke dalam objek dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa dan rincian objek belanja bantuan sosial barang yang diberikan ke pihak ketiga atau Masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2.6.3 Tujuan Bantuan Sosial

Tujuan penggunaan bantuan sosial yang telah diatur adalah untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Program bantuan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dalam hal ini penghasilan, kepemilikan harta benda, perumahan, pendidikan, keterampilan dan Kesehatan. Atas dasar kondisi tersebut agar dapat diupayakan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, meningkat kemampuan permodalannya dan pengembangan usaha agar terwujud kesejahteraan tanggungan keluarganya (Pratama et al., 2022)

Definisi di atas menyatakan bahwa tujuan bansos terhadap masyarakat yang membutuhkan itu melihat terlebih dahulu sebelum membagikan bansos dan harus adanya sasaran yang tepat agar masyarakat mendapatkan bantuan sosial tersebut

dapat terpenuhi hidupnya. Masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial tersebut bisa dibilang meningkatkan kesejahteraan sosial terutama di ekonomi keluarga yang memiliki keterbatasan-keterbatasan, bansos ini sangat membantu sekali bagi keluarga yang memiliki keterbatasan atau kekurangan dalam ekonomi dengan adanya bantuan sosial ini agar masyarakat atau keluarga yang kurang mampu bisa meningkatkan perubahan khususnya dalam kesejahteraan sosial di dalam hidupnya.

2.6.4 Pemanfaatan Bantuan Sosial Berdasarkan Dana APBN

Pemanfaatan bansos berdasarkan dana APBN ini dikelompokkan menjadi empat bidang, yaitu:

1. Bidang Pendidikan meliputi Program BOS dan Beasiswa Pendidikan Siswa/Mahasiswa Miskin
2. Bidang Kesehatan meliputi program Jamkesmas di Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Kelas III
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PNPM Perdesaan mencakup Kecamatan PPK, P2KP, PNPM Perkotaan, PNPM Infrastruktur Perdesaan/PPIP, PNPM Daerah tertinggal/PDT, PNPM Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/PISEW)
4. Bidang Perlindungan Sosial, meliputi Program Keluarga Harapan/PKH dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Rahayu, 2012)

2.6.5 Faktor keterlambatan yang timbul dalam mendistribusikan Bansos

Faktor Keterlambatan yang sering timbul dalam mendistribusikan bansos antara lain disebabkan oleh: Penentuan identitas penerima, yaitu bagi Masyarakat miskin yang pada umumnya tidak mempunyai identitas yang jelas masyarakat yang sering berpindah tempat atau merupakan penduduk musiman.

1. Proses kelengkapan data pendukung seperti pengajuan proposal pemilihan dan penetapan target penerima yang harus disahkan oleh pejabat terkait di daerah.
2. Penyiapan dokumen administrasi seperti penerbitan SK penyesuaian data penerima yang terdaftar sering tidak sesuai dengan kondisi daerah pembuatan rekening bagi penerima sering tidak sesuai
3. Pelaksanaan penganggaran bansos belum tepat waktu (Rahayu, 2012)

Definisi di atas menyatakan bahwa ada faktor keterlambatan untuk mendistribusikan bansos itu dari masyarakat yang kurang mampu sendiri dari persyaratannya harus lengkap untuk mendapatkan bansos dan mempunyai identitas tempat tinggal asli dari situ dan tidak musiman atau tidak berpindah tempat. Banyak faktor yang terhambat dikarenakan dana penganggaran bansos yang belum tepat waktu, maka dari itu harus adanya monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan atau dana bansos ini tepat sasaran terhadap masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu faktor keterlambatan ataupun penghambat bisa meminimalisir kesalahan dan terpenuhi untuk membagikan dana bansos tersebut.

Untuk melaksanakan program bansos perlu persiapan dan perencanaan yang sesuai dengan jumlah target sasaran, kewenangan pemerintah daerah, kondisi masyarakat setempat, pemilihan program yang lebih efektif, dan memberikan prioritas alokasi anggaran yang merata secara nasional sesuai dengan karakter dan kemampuan daerahnya masing-masing. Sementara itu, perencanaan administrasi untuk kegiatan tahun berikutnya sudah disiapkan kegiatan dan jadwal kegiatannya sebelum tahun anggaran dimulai (Rahayu, 2012)

Untuk melaksanakan program bansos diperlukan tenaga verifikator independen untuk melakukan monitoring dan evaluasi khususnya dalam ketepatan dan pemilihan target sasaran, manfaat yang akan diperoleh masyarakat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara transparan dan kontinu termasuk ketepatan pencairan dan pertanggungjawaban dana bansos agar anggaran bansos tidak tumpang tindih antara pendanaan yang dibiayai oleh APBN dan APBD (Rahayu, 2012)

2.6.6 Prosedur Pemberian Bantuan Sosial

Berbagai permasalahan sosial perlu segera diatasi dengan strategi yang tepat untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sama halnya pada masalah sosial kemiskinan yang memerlukan adanya strategi yang tepat agar dapat menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satunya yaitu dengan cara bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat agar dapat meminimalisir terjadinya kemiskinan tersebut. Pelaksanaan bantuan sosial tentunya tidak langsung diberikan begitu saja, melainkan perlu adanya prosedur tahapan pemberian bantuan sosial yang perlu diperhatikan bagi keluarga penerima manfaat.

Seperti yang diungkapkan Anastasia (2018) yang menyatakan mengenai prosedur tahapan pemberian bantuan sosial adalah:

1. Pengusul memasukkan surat permohonan tertulis kepada Kepala Daerah
2. Evaluasi permohonan yang telah dimasukkan pengusulan oleh SKPD yang telah ditunjuk oleh Kepala Daerah
3. Hasil evaluasi yang berupa rekomendasi dimasukkan pada TAPD
4. TAPD memberikan rekomendasi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
5. Hasil dari rekomendasi dan pertimbangan menjadi dasar penetapan alokasi anggaran dalam perancangan APBD tahun anggaran berjalan
6. Daftar penerima dana bantuan sosial ditetapkan oleh Kepala Daerah beserta besaran bantuan berdasarkan rekomendasi dari kepala SKPD
7. Penyaluran dana bantuan sosial berdasarkan *list* yang akan menerima bansos yang telah ditetapkan oleh pimpinan daerah dalam hal ini adalah kepala daerah
8. Penerima bansos bersama kepala daerah menandatangani NPBSD (Naskah Perjanjian Bantuan Sosial Daerah)
9. Pencairan dana bansos dalam bentuk uang adalah dengan cara melakukan pembayaran langsung (LS) (Anastasia, 2018)

2.7 Tinjauan tentang Rumah Tidak Layak Huni

2.7.1 Pengertian Rumah

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah tidak hanya dilihat sebagai sarana kebutuhan hidup, tetapi lebih dari itu rumah juga merupakan tempat bermukimnya manusia dalam menciptakan tatanan hidup untuk bermasyarakat (Sebayang, 2019)

Adapun definisi rumah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Perumahan dan Kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah Kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil Upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

2.7.2 Pengertian Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni merupakan program yang diperuntukan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. Dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara

wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), hibah dalam Negeri, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat (Halimah, 2019)

2.7.3 Tujuan Program Rumah Tidak Layak Huni

Tujuan program yaitu mengenai sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program rutilahu dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan merupakan pedoman dalam pencapaian program dan aktivitas serta untuk mengukur efektivitas. Tujuan program adalah faktor utama dalam menentukan efektivitas suatu program, hal ini dapat melihat apakah tujuan yang telah direncanakan sesuai atau tidak dalam pelaksanaannya. Dengan adanya program bantuan rumah tidak layak huni ini bertujuan untuk memberikan hunian yang layak kepada masyarakat miskin baik dari aspek fisik bangunan hingga aspek kesehatan.

Tujuan program rutilahu merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan, yaitu untuk memberikan bantuan rehabilitasi kepada rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin agar memiliki hunian yang layak. Layak dalam artian memiliki fisik bangunan yang kokoh, sirkulasi udara yang sehat dan sanitasi yang baik.

Selain itu, dalam pelaksanaan rutilahu yang dilakukan terdapat pemantauan program rutilahu tersebut sehingga dapat ditinjau sesuai dengan pelaksanaan yang baik dan benar. Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada penerima program agar tercapainya harapan atau tujuan yang diinginkan. Pemantauan program dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pada saat pembangunan rutilahu berjalan. Pemantauan dilaksanakan mulai saat pengajuan penerima bantuan sampai terlaksananya program rutilahu. Proses pemantauan juga dilaksanakan guna mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan kepada masyarakat melalui program bantuan rutilahu tersebut (Di et al., 2023)

2.7.4 Kriteria Penerima Bantuan Sosial Rumah tidak Layak Huni

Bantuan dana rutilahu ini harus dapat tepat sasaran kepada penduduk tidak mampu yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai syarat penerima bantuan dana Rutilahu, sehingga penduduk tidak mampu penerima bantuan dana rutilahu dapat menerima bantuan tersebut. Dalam pelaksanaannya, penduduk yang menerima bantuan rumah tidak layak huni ditentukan oleh badan keswadayaan masyarakat (BKM).

Penentuan layak tidaknya seorang penduduk dalam menerima rutilahu harus memenuhi kriteria yaitu mulai dari:

1. Kondisi rumah (Bangunan) yang meliputi kondisi luas ruangan
2. Kondisi jenis lantai yang layak untuk digunakan
3. Kondisi jenis atap yang sesuai dengan kebutuhan rumah yang layak serta tidak adanya masalah seperti bocor dan lainnya
4. Kondisi jenis dinding yang harus terawatt dan tahan retakan
5. Kondisi sumber penerangan (Listrik) yang memadai sehingga dapat memenuhi aktivitas sehari-hari
6. Kondisi pembuangan akhir (WC) yang layak dipakai

7. Kondisi sumber air minum yang higienis untuk diminum

Akan tetapi BKM dalam hal penetapan penentuan penerima bantuan, ada beberapa kesulitan yang ditemukan seperti banyaknya data-data calon penerima bantuan beda rumah serta kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pengolahan datanya. Untuk itu penting sekali menggunakan sistem pendukung keputusan sistem pendukung keputusan di implementasikan dalam menyelenggarakan pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang layak (Manurung et al., 2021)

2.7.5 Tahapan Program Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Program bantuan sosial rumah tidak layak huni dalam pelaksanaannya tidak dilakukan begitu saja, akan tetapi perlu adanya tahapan dalam program yang akan dilakukan tersebut. Tahapan ini diperlukan agar program rutilahu yang akan dilaksanakan tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat yang membutuhkan adanya rehabilitasi rumah tidak layak huni. Adapun tahapan-tahapan tersebut di bawah ini:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Proses pemberdayaan masyarakat miskin memerlukan perencanaan yang matang, sebab hal ini dapat menentukan kelancaran setiap kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dengan pelibatan seluruh unsur masyarakat, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengawasan proses pelaksanaan.

2. Pendataan

Pendataan adalah proses pencarian atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan, mengolah dan menyajikan data sesuai yang diharapkan. Sedangkan hasil dari pendataan adalah data, yaitu catatan atas kumpulan fakta. Data yang baik harus objektif dan dapat di pertanggungjawabkan. Data dipergunakan dalam pengambilan keputusan sehingga kevalidan data akan meningkatkan ketepatan sasaran dan akurat.

3. Pemberian Bantuan

Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat miskin adalah memberikan bantuan. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, dll (Oktapiani & Daeng, 2022)

2.7.6 Tingkat Kebutuhan Manusia Terhadap Hunian

Dalam permasalahan sosial ini kita bisa lihat terdapat masyarakat yang sangat membutuhkan atau masalah sosial ini perlu diatasi dengan strategi yang tepat dengan menggunakan solusi agar permasalahan sosial berkurang dan tidak meningkat lagi angka permasalahan kemiskinan ini. Jika dengan kehidupan yang cukup dan pemerintah tidak merata dan tidak tepat sasaran dalam pembagian dana seperti bantuan sosial akan banyak sekali masyarakat yang perlu kebutuhannya tidak terpenuhi, maka dari itu tingkat kebutuhan manusia terhadap hunian itu sangat perlu diperhatikan agar bisa terpenuhi bagi keluarga penerima manfaat ini. Rumah hakekatnya itu tempat tinggal atau berteduhnya manusia dengan kenyamanan, keamanan, ketenangan hidup, dan khususnya manusia dengan tempat tinggal ini bisa betah dan tinggal di lingkungan masing-masing yang Tingkat kebutuhannya cukup/terpenuhi.

Seperti yang diungkapkan Maslow yang membagi Tingkat Kebutuhan Manusia Terhadap Hunian sebagai berikut:

1. *Survival Needs*: Tingkat kebutuhan yang paling dasar di mana hunian merupakan sarana untuk menunjang keselamatan hidup manusia.
2. *Safety and Security Needs*: Hunian merupakan sarana perlindungan untuk keselamatan anggota badan dan hak milik.
3. *Esteem Needs*: Hunian merupakan sarana untuk mendapatkan pengakuan atas jati dirinya dari masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Rumah tidak lagi sebagai kebutuhan primer tapi sudah menjadi kebutuhan lux.

4. *Cognitive and Aesthetic Needs*: Hunian tidak saja merupakan sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri, tetapi juga dapat dinikmati keindahannya (Maslow, 1994)

Definisi di atas menyatakan bahwa mengenai Maslow yang membagi tingkat kebutuhan manusia yang dibagi menjadi 5 tahapan. Tingkat kebutuhan manusia ini perlu ditingkatkan mulai dari kebutuhan dasar yang hunian tercukupi, hunian juga merupakan sarana perlindungan, menjadi sarana untuk pengakuan jati dirinya, serta menjadi sarana peningkatan kebanggaan dan harga diri seseorang.

2.8 Teori Stakeholders (*Stakeholders Theory*)

Stakeholders atau pemangku kepentingan merupakan sebuah kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang sedang dijalankannya. *Stakeholders* biasanya diperlukan jika pada organisasi atau perusahaan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk suatu program, sehingga nantinya akan memiliki inovasi yang baik dan tujuan yang ingin diharapkan. Teori *stakeholders* pertama kali dikemukakan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 yang menjelaskan kepada siapa saja perusahaan bertanggung jawab. Teori ini berawal dari adanya kesadaran bahwa perusahaan mempunyai *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas perusahaan. Friedman mendefinisikan *stakeholders* sebagai:

“any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.” (Freeman, 1984)

Berdasarkan pernyataan di atas, yang dimaksud dengan *stakeholders* yaitu kelompok atau individu yang dalam pekerjaannya dapat mempengaruhi dan/ atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Hal ini dapat dikatakan bahwa peran *stakeholders* di sini merupakan kelompok atau individu yang saling

mempengaruhi atas segala sesuatu poses yang terjadi dalam organisasi maupun kelompok sehingga pelaksanaan tersebut akan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun pendapat lain mengenai pengertian *stakeholders* menurut Kasali dalam Wibisono (2007) yang mengungkapkan bahwa:

Stakeholders adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan. (Yusuf, W 2007)

Berdasarkan pengertian di atas, *stakeholders* merupakan sekelompok orang yang berada di dalam ataupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dan tugas dalam menentukan suatu keberhasilan yang akan perusahaan capai. Selain itu peran *stakeholders* ini berkaitan juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu organisasi ataupun program kegiatan yang dimana saling berkaitan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kasali juga menambahkan *stakeholders* dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

1. *Stakeholders* Internal dan *Stakeholders* Eksternal.

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*stakeholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok social responsible investor, licensing partner dan lain-lain.

2. *Stakeholders* Primer, *Stakeholders* Sekunder, dan *Stakeholders* Marjinal. *Stakeholders* primer adalah *stakeholders* yang paling penting, *stakeholders* sekunder adalah *stakeholders* yang kurang penting. Sedangkan *stakeholders* yang bisa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini tiap perusahaan bisa berbeda, urutannya tidak bersifat kaku, bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* Tradisional dan *Stakeholders* Masa Depan.

Karyawan dan konsumen dapat disebut *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberi pengaruh pada organisasi, seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

4. *Proponents*, *Opponents*, dan *Uncommitted*

Proponents adalah kelompok yang memihak organisasi, *opponents* adalah pihak yang menentang organisasi, dan *uncommitted* adalah pihak yang tak peduli dengan organisasi. Organisasi perlu mengetahui perbedaannya, agar dapat melihat permasalahan dan bisa merencanakan strategi yang sesuai.

5. *Silent Majority* dan *Vocal Majority*

Stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, ada yang menyampaikannya secara aktif (*vocal majority*) dan ada juga yang secara pasif (*silent majority*). (Yusuf, W 2007)

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa *stakeholders* ini mempunyai beberapa bagian yang mempunyai peran serta tugasnya dalam melakukan pekerjaan ataupun hal yang melibatkan orang lain. *Stakeholders* dalam melakukan peranannya tentu harus dengan berbagai pihak pemangku kepentingan yang berkaitan, hal ini dilakukan agar pekerjaan di suatu organisasi ataupun program yang sedang dijalankan mendapatkan hasil yang baik serta tujuan yang ingin dicapai.